

***Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata di Desa Ngargogondo Kecamatan Borobudur**

Fadlurrahman¹⁾, Ari Mukti²⁾, Yuni Kurniasih³⁾, Rizza Arge Winanta⁴⁾

*1), 2), 3), 4) Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar
Email :Fadlurrahman@untidar.ac.id¹⁾, muk_ary@yahoo.co.id²⁾, yuni.kurniasih@untidar.ac.id³⁾,
Rizzaarge@untidar.ac.id⁴⁾*

ABSTRACT

Ngargogondo, a village which is close to the world's tourist attractions, Borobudur Temple, wants to be developed into a tourist village. Some of the tourism potentials of this village include language village tours, Balkondes which provides meeting packages, home stays, off road jeeps tour, vw tours, trails tours, and andong village tours, durian nursery centers, ireng mask dance, and the Krobong craft center. Although there is a lot of potential, the development still not massive enough. The research was conducted with descriptive qualitative method. The research location is in Ngargogondo Village, Borobudur District, Magelang Regency, Central Java. Data collected through FGD, interviews, observation, and documentation. Informants were selected purposively. The results of the study indicated that Ngargogondo Village had an uncoordinated stakeholder network structure. They are Disparpora Magelang Regency, Tidar University, PT. Pegadaian, Ngargogondo Village Government, Pokdarwis, Balkondes, BUMDes, and the Social Community. Stakeholders have contributed according to their respective roles. One thing that is unfortunate is that the existing networked structure does not yet have a unified vision and ideals towards the formation of a tourist village. There are concerns that there will be overlapping or friction between the Pokdarwis, Balkondes, and BUMDes fields of tourism business due to the unclear division of labor if an organized network structure is formed.

Keywords : *Collaborative Governance, Ngargogondo Village, Tourism Village*

ABSTRAK

Desa Ngargogondo yang dekat dengan obyek wisata dunia yakni Candi Borobudur, ingin dikembangkan menjadi sebuah desa wisata. Beberapa potensi wisata yang dimiliki desa ini antara lain wisata desa bahasa, Balkondes, home stay, jeep off road, vw tour, trabasan trai, wisata desa andong, pisat pembibitan durian, tari topeng ireng, dan pusat kerajinan krobong. Meskipun terdapat banyak potensi pendukung wisata, namun pengembangannya belum cukup masif. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di Desa Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik FGD, wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan Desa Ngargogondo memiliki struktur jaringan stakeholder yang tidak terkoordinir dengan baik, yaitu Disparpora Kabupaten Magelang, Universitas Tidar, PT. Pegadaian, Pokdarwis, Balkondes, BUMDes, dan masyarakat itu sendiri. Meskipun masing-masing stakeholder telah menjalankan perannya, namun networked structure yang ada belum memiliki kesatuan visi dan cita-cita menuju terbentuknya sebuah desa wisata. Terdapat kekhawatiran akan adanya tumpang tindih atau terjadi gesekan lahan bisnis wisata di kalangan Pokdarwis, Balkondes, dan BUMDes karena pembagian kerja yang tidak jelas jika suatu saat dibentuk struktur jaringan yang terorganisir.

Kata Kunci : *Collaborative Governance, Desa Ngargogondo, Desa Wisata*

1. Pendahuluan

Pariwisata menjadi salah satu sektor ekonomi yang strategis dan memiliki pertumbuhan cepat. Peningkatan jumlah destinasi dan investasi di bidang pariwisata, menjadikan pariwisata sebagai salah satu faktor kunci yang berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan perekonomian melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha dan infrastruktur. Pertumbuhan positif sektor pariwisata dapat dilihat melalui jumlah perjalanan wisata yang selalu menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 2015 – 2019. Sementara di masa pandemi Covid 19 tahun 2020 mengalami penurunan signifikan, namun bukan berarti tidak ada sama sekali.

Berbagai upaya untuk mengembangkan dan mempertahankan pertumbuhan sektor pariwisata di sektor pariwisata ini memerlukan keterlibatan dan peran aktif dari berbagai aktor atau stakeholder. Hal tersebut sejalan dengan paradigma *governance* dalam ilmu administrasi negara melalui pendistribusian sebagian kewenangan pemerintah kepada kelompok lainnya sehingga terwujud sinergitas dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Konsep *governance* selanjutnya berkembang menjadi *collaborative governance* dengan maksud bahwa segenap elemen non pemerintah yang berkepentingan terhadap suatu kebijakan harus dilibatkan secara konsensus baik dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dengan demikian output dan outcome kebijakan menjadi tanggung jawab bersama para pihak, bukan lagi tersentral di tangan pemerintah (O'Brien, 2012). Paradigma *collaborative governance* sebagai sebuah basis alternatif dinilai mampu mewujudkan percepatan dan implementasi pengembangan pariwisata. *Collaborative governance* merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai stakeholder yang terkait untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama. (Hartman et al., 2002).

Desa Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang yang berbatasan dengan Desa Wisata Candirejo dan Desa Wisata Kriya Wanurejo, terletak di barisan Pegunungan Menoreh tepatnya tiga kilometer arah tenggara Objek Wisata Candi Borobudur. Desa Ngargogondo mempunyai latar belakang perbukitan dan didukung oleh kondisi alamnya yang masih alami dan memiliki pemandangan alam yang indah mempesona. Masyarakat Desa Ngargogondo sebagian besar bermata pencaharian petani. Selain itu seni kerajinan yang berkembang di Desa Ngargogondo adalah usaha kerajinan Krombong Anyam Kepang yang diperjual belikan sebagai cinderamata di lokasi kawasan wisata candi Borobudur. Desa Ngargogondo juga memiliki kesenian yang berupa tari bernama Tari Topeng Ireng kepanjangan dari Tata Lempeng Irama Kenceng yang artinya baris lurus irama keras. Tari Topeng ireng lahir dan berkembang di lereng Gunung Merbabu dan Merapi. Kesenian itu sering dipergunakan untuk acara hajatan, atau tari selamat datang.

Desa Ngargogondo memiliki beberapa potensi yang kuat untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata sebagai bagian dari pengembangan kawasan wisata Borobudur. Daya tarik akan hal tersebut yang digunakan oleh masyarakat Desa Ngargogondo untuk menarik wisatawan agar betah berlama-lama tinggal. Desa Ngargogondo yang dekat dengan obyek wisata dunia Candi Borobudur, mempunyai berbagai potensi baik alam maupun sumber daya manusianya.

Selain beberapa potensi diatas yang dimiliki Desa Ngargogondo, ada pula potensi lain yang dimiliki Desa Ngargogondo yaitu Desa Bahasa, Sejak tahun 2007 Desa Ngargogondo ditetapkan sebagai Desa Bahasa. Tiap Selasa dan Jumat anak-anak dibiasakan bercakap dalam bahasa asing, terutama Inggris. Selain itu juga diajarkan bahasa Jepang dan bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi. (<http://balkondesborobudur.com>). Selain itu Desa Ngargogondo juga mempunyai Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Balkondes merupakan sebuah program bentukan BUMN yang akan dimanfaatkan sebagai sebuah etalase bagi perekonomian daerah di wilayah sekitar Candi Borobudur, Kabupaten Magelang. Pengembangan Balkondes ini menggunakan dana CSR yang berasal dari BUMN yang memberikan kontribusinya dengan membina desa desa yang ada di wilayah sekitar Candi Borobudur, diharapkan dengan membina desa desa tersebut dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat desa di kawasan Candi Borobudur. Balkondes ini menyediakan beberapa pelayanan diantaranya penyediaan meeting package, home stay, jeep off road, vw tour, trabasan trail, dan wisata desa andong.

Meskipun Desa Ngargogondo memiliki banyak potensi, namun pengembangan pariwisata di desa ini belum cukup masif. Berdasarkan atas beberapa kondisi tersebut maka dipandang perlu melihat kolaborasi para stakeholder dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata di Desa Ngargogondo. Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata di Desa Ngargogondo? dan apa saja yang menjadi kendala dalam proses *collaborative governance* tersebut? Dengan begitu, maka tujuan penelitian ini sudah jelas yakni untuk menganalisis proses *collaborative governance* beserta hambatan yang menyertainya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilakukan di Desa Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Informan dipilih secara *purposive* meliputi perangkat desa, pokdarwis, pelaku wisata, pelaku usaha potensial, dan pemerintah Kabupaten Magelang. pengumpulan data menggunakan berbagai teknik, diantaranya FGD, wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Kemudian analisis data dilakukan secara interaktif meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. Konsep Collaborative Governance

Collaborative governance berangkat dari konsep *governance*, yang mengandung makna bahwa keterlibatan penuh unsur-unsur pemerintah maupun non-pemerintah (Dwiyanto, 2015:251). Konsep *governance* mengandung makna pemerintah bukan menjadi *the only actor* dalam *decision making*. Peran *single actor* pemerintah terdistribusi menjadi multi-aktor. Konsekuensinya yaitu pemerintah mengikutsertakan swasta dan masyarakat dalam menangani urusan-urusan publik. Dengan demikian keberadaan pemerintah tidak lagi dominan. Penerapan *governance* harus sesuai dengan beberapa prinsip yaitu aktor yang terlibat berasal dari pemerintah dan dari luar pemerintah, dimana masing – masing memiliki uraian tugas dan keterikatan hubungan yang jelas, dan penyelesaian masalah dilakukan secara otonom tanpa bertumpu pada kekuatan pemerintah semata.

Dalam *collaborative governance*, kolaborasi dipandang sebagai respon atas perubahan lingkungan. Dapat digambarkan bahwa isu-isu publik semakin kompleks dengan kondisi kemampuan pemerintah terbatas. Di sisi lain institusi non-pemerintah semakin meningkat, inisiatif masyarakat juga semakin meningkat dan cenderung semakin kritis. Pemerintah dituntut untuk melakukan penyesuaian sehingga relevan dengan gejala perubahan-perubahan lingkungan eksternal yang terjadi. Persoalan tersebut mendorong pemerintah untuk mampu berkolaborasi dengan sektor privat dan masyarakat yang memiliki interest pada persoalan yang dialaminya.

Kolaborasi dapat dikatakan sebagai sebuah proses pengelolaan organisasional yang didalamnya terdapat sejumlah institusi pemerintah maupun non-pemerintah, termasuk *Non-Government Organization* (NGO) dan swasta ikut terlibat, dengan model yang bervariasi. Pemerintah dapat melibatkan NGO lokal saja, instansi swasta saja atau juga bisa dalam bentuk instansi yang berafiliasi ke pemerintah bekerjasama dengan beberapa NGO dengan pendanaan dari swasta/hibah luar negeri. Namun demikian dalam kolaborasi porsi keterlibatan masing-masing aktor tidak selalu sama bobotnya.

Secara konseptual, *collaborative governance* merupakan serangkaian proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Para pihak / stakeholder menjalankan peran yang berbeda satu sama lain, sehingga tugas dan fungsi masing-masing anggota kolaborasi berbeda sesuai kedudukan yang dimiliki (Emerson et al, 2011:2; Ansell & Gash, 2007:544). Benyun & Edwards mengistilahkan kolaborasi sebagai *community governance* yang berfokus pada pengelolaan masalah -masalah kompleks dalam bidang kesejahteraan publiknya, sehingga penyelesaiannya memerlukan sinergitas publik dan swasta (Yuyun, 2013:38).

Collaborative governance muncul secara adaptif yang disebabkan oleh adanya kompleksitas dan ketergantungan antar institusi, berbagai konflik kepentingan yang bersifat laten dan sulit diredam, serta adanya upaya mencari metode baru untuk memperoleh legitimasi politik (Sudarmo, 2009: 124). *Collaborative governance* akan sangat bermanfaat jika terdapat suatu

upaya pemecahan persoalan publik namun belum membuahkan hasil, sehingga kolaborasi akan menjadi legitimasi kuat atas keputusan yang telah diambil bersama-sama (Sudarmo, 2009: 124). Melalui kolaborasi dapat tercipta pemahaman melalui sharing gagasan informasi antara berbagai pihak, memberikan mekanisme penyelesaian suatu ketidakpastian, terbangun mekanisme pengambilan keputusan yang efektif, dihasilkan perangkat kerja yang efektif melalui koordinasi lintas batas, dan berkembangnya kapasitas bersama multi pihak untuk menghadapi tantangan di masa depan (Wandolleck & Yaffe dalam Tanjung Redeb, 2011:8). Adapun wujud dari *collaborative governance* dapat berupa institusi formal maupun tidak, namun lebih merepresentasikan cara bertindak *a way of behaving* para aktor non-pemerintah untuk terlibat ke dalam manajemen publik pada suatu periode.

Collaborative governance memiliki beberapa dimensi diantaranya sebagai berikut (Sudarmo, 2011):

a. Networked structure

Network structure yaitu struktur organisasi yang terdiri dari sebuah inti pusat yang dihubungkan melalui jaringan hubungan dengan kontraktor luar dan pemasok layanan penting lainnya. Setidaknya terdapat 3 bentuk struktur jaringan, yaitu (Milward and Provan dalam Sudarmo: 2011:111): *self governance*, suatu struktur yang tidak memiliki satuan administratif, akan tetapi masing-masing pihak berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di struktur jaringan (network) tersebut; *lead organization*, struktur yang memiliki satuan administratif sebagai bagian dari struktur jaringan (network); dan *network administrative organization*, struktur yang ditandai dengan adanya satuan administratif untuk mengelola network, bukan sebagai penyedia layanan.

b. Commitment to common purpose

Berkaitan dengan latar belakang dibuatnya suatu networking. Tentu alasan utamanya terletak pada komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan bersama, yang umumnya juga tertuang dalam visi dan misi organisasi.

c. Trust among the participants

Kepercayaan antara para pihak dalam kolaborasi didasarkan pada hubungan profesionalitas dan / atau sosial, sehingga mereka mempercayakan usaha-usaha yang dilakukan oleh stakeholder lain dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama.

d. Access to authority

Akses terhadap wewenang berkaitan dengan ketersediaan standar dan prosedur. Seluruh stakeholder harus diberikan kewenangan untuk mengimplementasikan keputusan - keputusan bersama.

- e. *Distributive accountability*
Upaya pengelolaan tugas bersama harus dibagi kepada seluruh stakeholder terkait dan agar setiap pihak mendapatkan tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- f. *Information sharing*
Berkaitan dengan kemudahan bagi para anggota untuk mengakses berbagai informasi yang diperlukan dalam mencapai tujuan bersama.
- g. *Access to resources*
Yaitu tersedianya risorsis dalam bentuk anggaran, sarana dan prasarana, SDM dan sumber daya lain yang diperlukan.

4. Pembahasan

Desa Ngargogondo adalah desa yang berada di kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Sejarah desa ini berasal dari kata argo dan gondo yang mempunyai arti gunung dan aroma. Desa Ngargogondo terletak di sebelah selatan Candi Borobudur di lereng Bukit Menoreh yang sangat indah sebagai nilai plus yaitu memiliki pemandangan yang indah, asri, mempesona, dan tidak ditemukan di desa lain. Jika ditempuh dari Candi Borobudur, Desa Ngargogondo berjarak sekitar 4 km dan sangat mudah ditempuh dengan berbagai kendaraan seperti sepeda motor, mobil, bus dan lainnya. Luas Desa Ngargogondo sendiri yaitu 1,53 km². Untuk jumlah penduduk sebanyak 1.699 jiwa. Sedangkan untuk kepadatan penduduknya yaitu 1.110 jiwa/km². Batas wilayah administratif Desa Ngargogondo meliputi: Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tuksongo, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Candirejo, Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wanurejo, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Majaksingi. Sementara Batas Alam Desa Ngargogondo meliputi: Sebalah Barat berbatasan dengan Sungai Kecil, Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Sileng, Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai sileng, Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Menoreh.

Ngargogondo adalah desa yang sangat asri, karena terletak di kawasan Bukit Menoreh mempunyai banyak sekali potensi alam yang mendukung pengembangan desa. Masyarakat Desa Ngargogondo sendiri tergolong masyarakat yang mau berperan aktif memajukan potensi desanya. Karena semangat dari masyarakatnya Desa Ngargogondo menjadi salah satu desa yang akan tumbuh menjadi desa wisata selain itu juga Desa Ngargogondo juga punya sebutan Desa Wisata Borobudur. Di Desa Ngargogondo sudah terdapat beberapa obyek wisata yang sudah ada maupun yang masih dalam proses. Obyek wisata yang sudah ada dan cukup terkenal di Desa Ngargogondo yaitu Desa Bahasa dan Wisata kelinci, serta Balkondes Ngargogondo The Gade Village yang menawarkan penginapan konsep pedesaan. Selain itu juga terdapat obyek wisata yang sedang dalam tahap pengembangan yaitu Terasering, yang menawarkan glamping, top selfie, edukasi tanaman, dan kuliner. Terdapat juga beberapa UMKM yang ada di Desa

Ngargogondo yaitu UMKM dream catcher, UMKM kerajinan kayu, UMKM slondok, dan UMKM bataco. Dengan semangat masyarakat Desa Ngargogondo dalam kemajuan dan pengembangan desa sebagai desa wisata membuat Ngargogondo sebagai salah satu obyek kawasan tujuan pariwisata Borobudur.

Desa Ngargogondo memiliki keunggulan akan adanya sumber daya manusia dan sumber daya alam yang sangat mendukung dalam pengembangan desa wisata. Masyarakat Desa Ngargogondo memiliki keramahan, sopan satun, budaya jiwa gotong royong dan semangat kerja yang tinggi. Budaya gotong royong di Desa Ngargogondo masih cukup kental terlebih untuk mengelola desa khususnya dalam budang pariwisata. Meskipun demikian terdapat beberapa hal yang belum optimal dalam meningkatkan potensi desa. BUMDes Ngargogondo merupakan kelembagaan desa yang salah satunya menjadi bagian dari hal yang belum optimal dalam pengembangan desa. Dikatakan oleh salah satu anggota BUMDes bahwa kondisi BUMDes dalam Desa Ngargogondo saat ini adalah mati suri, artinya lembaga ini tidak memiliki aktivitas untuk dijalankan. Reaktivasi ini BUMDes perlu dukurangan dari masyarakat, dalam bentuk musyawarah pengembangan BUMDes.

Aspek berikutnya yang belum optimal dari Desa Ngragogondo adalah pendanaan. Usaha untuk mendapatkan pendanaan terhadap Desa Ngargogondo sudah dilakukan oleh Bapak Umar Syahid, sebagai kepala desa Ngargogondo. Usaha yang dilakukan yaitu mencari pendanaan melalui corporate sosial responsibility (CSR) Bank BRI. Hal tersebut dilakukan karena adanya informasi pada salah satu tempat wisata di daerah Kabupaten Magelang yang mendapatkan pencairan dana dengan nominal yang tinggi. Selain itu, dikatakan oleh salah satu anggota Pokdarwis (Kelompok sadar wisata) Desa Ngargogondo yaitu Bapak Asrori, bahwa dana yang didapatkan untuk menciptakan tempat wisata Terasering Sebagian besar dari investor masyarakat. 150 masyarakat Desa Ngargogondo sudah mulai berinvestasi senilai Rp1.000.000 yang mana pembayarannya boleh dicicil satu kali dalam satu bulan. Namun, investasi ini sifatnya tidak memaksa. Kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngargogondo karena memang kekurangan dana untuk menciptakan obyek wisata baru yang lebih menarik.

Hal ketiga yang menjadi kurang optimal adalah mengenai akses perjalanan dan akses perairan. Sumber air yang kurang dan akses jalan yang sempit tergolong belum optimal dikatakan oleh Bapak Asrori sebagai salah satu anggota Pokdarwis (Kelompok sadar wisata) Desa Ngargogondo sekaligus menjadi tenaga kerja dalam pembangunan wisata baru yaitu Terasering. Akses perjalanan dan akses perairan menjadi hal yang saling berhubungan. Dalam membangun sebuah proyek, agar lebih cepat dibutuhkan pengangkutan bahan material yang banyak dan cepat. Sedangkan perairan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan. Untuk membuat sumber perairan yang lebih lanca juga dibutuhkan bahan dan alat yang dibawa ke lokasi pembangunan. Sedangkan akses jalan menuju lokasi

pembangunan Terasiring dikategorikan kurang lebar untuk dilewati truk truk yang besar, namun masih bisa dilewati truk yang berukuran sedang.

Saat ini terdapat beberapa pihak yang ikut berperan dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata di Desa Ngargogondo:

a. Pokdarwis

Pokdarwis belum banyak berperan dalam pengelolaan wisata. Beberapa anggota pokdarwis juga menjadi pelaku wisata namun bergerak secara personal untuk memasarkan paket wisata jika ada permintaan untuk keliling desa di sekitar Borobudur. Peran pokdarwis di Desa Ngargogondo saat ini difokuskan pada pengembangan pengelolaan obyek wisata Terasering. Obyek ini diharapkan menjadi daya taring unggulan disamping Desa Bahasa.

b. BUMDes

Lembaga ini masih vakum dan masih dalam proses mencari jati diri apakah akan bergerak di bidang pariwisata atau bidang lainnya. BUMDes memiliki rencana untuk menyusun paket wisata yang dapat dijual kepada wisatawan Candi Borobudur. Obyek yang akan dipasarkan yaitu tour wisata Desa Ngargogondo. Namun demikian hal ini masih belum terealisasi.

c. Pemerintah

Unsur ini diwakili oleh Pemerintah Desa Ngargogondo dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah raga (Disparpora) Kabupaten Magelang. Mereka berperan dalam memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada pelaku wisata setempat secara berkala melalui anggaran pemerintah daerah dan pemerintah desa. Tiap bulan diselenggarakan kegiatan pelatihan seperti pengelolaan desa wisata, penataan homestay, dan hospitality.

d. PT. Pegadaian

BUMN ini telah memberikan kontribusi yang cukup besar dengan membangun Balkondes di Desa Ngargogondo sebagai bagian dari program CSR. Balkondes didirikan diatas tanah bengkok desa. Operasional Balkondes dijalankan secara otonom oleh penduduk lokal dengan sepenuhnya keuntungan dinikmati oleh pengelola dan pemerintah desa sebagai pemilik tanah bengkok. PT. Pegadaian masih memberikan bantuan pelatihan dan pengembangan fisik Balkondes, namun tidak sering. Saat ini Balkondes Desa Ngargogondo menjadi salah satu unit unggulan untuk menarik wisatawan, dengan memberikan pelayanan homestay, paket wisata, dan paket meeting.

e. Perguruan tinggi

Universitas Tidar telah memiliki kontribusi dalam pengembangan pariwisata di Desa Ngargogondo

dalam bentuk riset dan pendampingan. Namun disayangkan bahwa pendampingan tidak dilaksanakan secara berkesinambungan, dan cenderung berbasis program anggaran dari perguruan tinggi. Pendampingan yang dilakukan juga dinilai belum disesuaikan dengan kebutuhan pelaku dan pengembangan wisata di Desa Ngargogondo.

f. Masyarakat

Masyarakat Desa Ngargogondo memiliki peran yang sentral dalam penerapan pariwisata berbasis masyarakat. Mr Hani selalu pemilik Desa Bahasa dan anggota pokdarwis telah menginisiasi pengembangan obyek wisata Terasering dengan menggalang dana dan tenaga kerja dari masyarakat lokal. Sekitar 110 masyarakat telah menanamkan saham untuk pembangunan obyek wisata Terasering. Pengembangan obyek wisata di Desa Ngargogondo kedepan akan menggunakan pola demikian.

Sementara itu pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Desa Ngargogondo dapat diuraikan sebagai berikut:

a. *Networked Structure*

Keberadaan jaringan pengelolaan pariwisata Desa Ngargogondo dapat dikategorikan dalam bentuk self governance, sebagai sebuah struktur yang tidak memiliki satuan administratif, akan tetapi masing-masing pihak berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di struktur jaringan (network) tersebut. Hasil observasi lapangan dan wawancara menunjukkan bahwa unit – unit yang terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata yang meliputi Pemerintah Desa Ngargogondo, Disparpora Kabupaten Magelang, Pokdarwis, Balkondes, BUMDes, PT. Pegadaian, Universitas Tidar, dan masyarakat tidak memiliki struktur organisasi khusus yang menguraikan pembagian tugas, hubungan koordinatif, serta job description masing-masing pihak. Kontribusi mereka terkesan tidak terkoordinir, bahkan para pelaku wisata masih melayani paket wisata secara personal. Belum ada organisasi yang menaungi dan menyatukan langkah gerak mereka menuju satu visi pengembangan wisata Desa Ngargogondo. Meskipun demikian setiap instansi telah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan pariwisata di Ngargogondo, sebagaimana yang dijelaskan pada uraian sebelumnya.

b. *Commitment to common purpose*

Masyarakat dan pelaku wisata di Desa Ngargogondo memiliki semangat untuk mengembangkan sektor pariwisata dikarenakan mereka merasa telah tertinggal oleh desa desa lainnya yang telah

berkembang menjadi desa wisata. Pengembangan sektor pariwisata juga didorong oleh keinginan kuat untuk memanfaatkan keramaian wisata Borobudur. Para pelaku wisata di Desa Ngargogondo telah belajar dari desa-desa lainnya di Kecamatan Borobudur yang bahkan cukup jauh dari Candi Borobudur tetapi memiliki jumlah kunjungan wisatawan yang tinggi. Komitmen untuk mengejar ketertinggalan ini terwujud dalam semangat pengembangan Obyek Wisata Terasering yang telah melibatkan pemerintah desa, pokdarwis, dan masyarakat.

c. *Trust among the participants*

Kepercayaan antara para pihak dalam kolaborasi didasarkan pada hubungan profesionalitas dan / atau sosial, sehingga mereka mempercayakan usaha-usaha yang dilakukan oleh stakeholder lain dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Aspek kepercayaan ini telah berjalan yang digambarkan dalam hubungan antara Pemerintah Desa Ngargogondo, PT Pegadaian, dan Pengelola Balkondes dalam operasional Balkondes. Sejak Balkondes diserahkan oleh PT. Pegadaian kepada Pemerintah Desa Ngargogondo, para pengelola memiliki otonomi yang luas dalam menjalankan dan mengembangkan Balkondes tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun. PT. Pegadaian selaku pendiri Balkondes hanya melakukan monitoring perkembangan tanpa intervensi atau bahkan meminta bagi hasil keuntungan kepada Balkondes, karena dana pembangunan yang mereka gelontorkan murni merupakan program CSR. Pemerintah Desa Ngargogondo sebagai pemilik tanah bengkok juga mempercayakan pengelolaan Balkondes sepenuhnya kepada para pengurus yang telah dipilih. Bentuk trust yang lain terjadi dalam hubungan antara masyarakat dengan Pokdarwis dalam pembangunan Obyek Wisata Terasering dimana masyarakat mempercayakan sepenuhnya dana sana penanaman saham kepada Pokdarwis.

d. *Access to authority*

Masing-masing stakeholder memiliki tanggungjawab dan wewenang sesuai dengan peran masing masing. Disparpora Kabupaten Magelang dan Universitas Tidar sebagai pihak eksternal bertindak dan berwenang untuk memberikan pendampingan dan penguatas kapasitas kelembagaan dan kemampuan teknis bagi pelaku wisata, Pemerintah Desa Ngargogondo sebagai regulator berwenang mengatur pemanfaatan lahan yang dikembangkan sebagai obyek wisata dan membagi tugas dan peran pelaku wisata. Pokdarwis, Balkondes dan BUMDes sebagai

pelaksana berwenang mengelola, menjual, dan mengembangkan obyek serta paket wisata. Sementara masyarakat berwenang untuk memberikan dukungan dalam bentuk pikiran, tenaga, waktu, serta biaya. Masyarakat juga dapat melakukan koreksi terhadap ketidaksesuaian atau penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan wisata di Desa Ngargogondo.

e. *Information sharing*

Informasi yang beredar di kalangan stakeholder pariwisata Desa Ngargogondo terdiri dari informasi internal dan eksternal. Namun demikian tidak semua stakeholder mendapatkan informasi yang sepadan, mengingat belum adanya struktur / keorganisasian yang mengikat para stakeholder. Informasi akan berjalan secara natural sesuai dengan peran dan tugas masing masing stakeholder itu. Informasi internal, yang berkaitan dengan perkembangan pengembangan wisata lokal, yaitu obyek wisata Terasering, umumnya beredar di kalangan pokdarwis, balkondes, pemerintah desa, dan masyarakat sebagai pihak yang paling berkepentingan. Perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan PT. Pegadaian hanya sebatas mengetahui adanya pembangunan obyek wisata tersebut. Sementara informasi eksternal berkaitan dengan perkembangan kebijakan pemerintah, pelatihan dan pendampingan biasanya dibawa oleh Disparpora, Universitas Tidar kepada pemerintah desa untuk dikomunikasikan dan dikoordinasikan kepada Pokdarwis maupun Balkondes.

f. *Access to resources*

Dikarenakan belum ada keorganisasian khusus yang menaungi para stakeholder dalam mengembangkan pariwisata di Desa Ngargogondo, maka belum terdapat aset yang dapat digunakan secara bersama-sama. Pengembangan pariwisata setidaknya membutuhkan anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Pembangunan Terasering misalnya, tidak dibiayai dengan dana desa, namun menggunakan dana yang dikumpulkan oleh masyarakat melalui mekanisme saham. Keseluruhan dana masyarakat ini dikelola oleh Pokdarwis untuk belanja bahan dan tenaga pembangunan Terasering. Selanjutnya pemerintah desa memberikan dukungan kebijakan dan sarana prasarana apabila diperlukan.

5. Kesimpulan

Desa Ngargogondo memiliki networked structure stakeholder yang tidak terorganisir (self governance) dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata. Mereka adalah Disparpora Kabupaten Magelang, Universitas Tidar, PT. Pegadaian, Pemerintah Desa Ngargogondo, Pokdarwis, Balkondes, BUMDes, dan

Masyarakat. Masing-masing stakeholder telah memberikan kontribusi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Satu hal yang disayangkan bahwa networked structure yang ada belum memiliki kesatuan visi dan cita – cita menuju terbentuknya sebuah desa wisata. Terdapat kekhawatiran akan adanya tumpang tindih atau hilangnya lahan bisnis wisata di kalangan Pokdarwis, Balkondes, dan BUMDes karena pembagian kerja yang tidak jelas jika suatu saat dibentuk networked structure yang lebih terorganisir (network administrative organization). Padahal berdirinya desa wisata merupakan kondisi yang diimpikan oleh masyarakat Desa Ngargogondo agar tidak merasa tertinggal dengan desa – desa tetangga yang telah lebih dahulu berdiri menjadi desa wisata. Kondisi networked structure yang belum terkoordinir diikuti dengan tidak optimalnya dimensi collaborative governance lainnya, sehingga hal ini menjadi kendala bagi percepatan pembentukan desa wisata di Ngargogondo.

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu untuk mewujudkan network administrative organization diperlukan adanya musyawarah stakeholder guna membahas uraian kerja masing – masing stakeholder dan pembagian lahan bisnis wisata. Selanjutnya perlu dibentuk forum komunikasi yang terarah menuju pengembangan desa wisata.

Daftar Pustaka

- Alamsyah, D., N. Mustari, R. Hardi, dan A. Mone. 2019. Collaborative Governance dalam Mengembangkan Wisata Edukasi di Desa Kamiri Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*. Vol 4(2): 112-127.
- Ansell, C., dan A. Gash. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*. Vol 18(4): 543-471
- Diani, R.M dan Y.K.G. Simbolon. 2017. Analisis Penerapan Collaborative Governance dalam Pengelolaan Pariwisata Bencana Lava Tour. *Forum Ilmu Sosial*. Vol. 44(1): 43-54.
- Dwiyanto, A. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik; Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Emerson, K., T. Nabatchi, dan S. Balogh. 2011. An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*. Vol 22(1): 1-29.
- Hartman, C. L., P. Hofman, dan E. R. Stafford. 2002. Environmental collaboration: potential and limits. In T. de Bruijn & A. Tukker (Eds.), *Partnership and Leadership: Building Alliances for a Sustainable Future* (pp. 21-40). Dordrecht: Boston: Kluwer Academic Publishers. And, Cordery, J.
- Hasanah, H. 2016. Teknik-Teknik Observasi. *Jurnal at-Taqaddum*. Vol. 8(1): 21-46.
- Mafaza, A dan K. Setyowati. 2020. Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal Kebijakan Publik*. Vol. 11(1): 1-58.
- O'Brien, M. 2012. Review of Collaborative Governance: Factors crucial to the internal workings of the collaborative process. Published by The Ministry for the Environment.
- Rosaliza, M.(2015). Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol 11 No 2 Februari 2015, pp 71.79.
- Sudarmo. 2011. *Isu-Isu Administrasi Publik Dalam Perspektif Governance*. Surakarta: Smart Media.
- Syawal, S.S dan S. Samuda. 2017. Dinamika Collaborative Governance Dalam Festival Legu Gam Sebagai Wisata Kultural Kota Ternate. *NATAPRAJA Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*. Vol 5(2): 145-162.
- Yasinta, P.N. 2020. Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Vol. 4(1): 1-23.
- Yani, A., J. Saputra, Z. Muhammad, Aiyub., Nazaruddin., T. Aisyah, C. T. Musafira, O. Petege, Rahmat, Miska. 2021. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 495
- Zaenuri, M. 2014. Mengelola Pariwisata-Bencana: Perlunya Perubahan Paradigma Pengelolaan Pariwisata dari Adaptive Governance Menuju Collaborative Governance. *UNISIA*, Vol. 36(81): 157-168